

*Rencana Kerja
(RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA*



Tahun

2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pangaduan Heubeul No. 48 Sumedang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Pangaduan Heubeul No.48, No.Tlp: (0261) 201811,
Website : satpolpp.sumedangkab.go.id E-mail : , 45311

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
7. Peratruran Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

- tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 25. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 2. Koordinator Tenaga Ahli ;
 3. Tenaga Ahli Penyusun

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Point (1) mempunyai tugas :
1. Menyiapkan data sebagai bahan penelitian Koordinator Tenaga Ahli dalam penyusunan Renja Tahun 2025 ;
 2. Menyusun data dan informasi Kajian Tenaga Ahli Penyusun ;
 3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati ;
- KETIGA : Koordinator Tenaga Ahli Point sebagaimana dimaksud diktum KESATU Point (2) mempunyai tugas :
1. Meneliti dan memberikan arahan - arahan teknis dalam rangka pelaksanaan penyusunan Renja Tahun 2025 ;
 2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran
 3. Meneliti data dan informasi yang telah dikumpulkan ;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Penyusun Point sebagaimana dimaksud diktum KESATU Point (3) mempunyai tugas :
1. Melakukan Koordinasi dengan Tim Teknis Kegiatan dan Koordinator Tenaga Ahli;
 2. Menganalisa bahan dan informasi;
 3. Melakukan Penyusunan Renja Tahun 2025.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 10 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMEDANG,



SYARIF EFFENDI BADAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 19 Tahun 2024

Tanggal : 10 Juli 2024

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025**

A. TimPelaksana Teknis Kegiatan :

- Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Ketua : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Sekteratis : Kepala Sub Bgaian Umum, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
 2. **Iwan Satriana**
Pelaksana pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
 3. **Eko Vebrianto**
Non PNS / Honorer pada Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
 4. **Dela Rachmaati**
Non PNS / Honorer pada Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
 5. **Agit Perwata Kusumah**
Non PNS / Honorer pada Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMEDANG,

SYARIF EFFENDI BADAR

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang disesuaikan dengan adanya kondisi saat ini perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 10 Juli 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUMEDANG,
Kepala,

SYARIF EFFENDI BADAR, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710307 199101 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2023 7

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 12

2.3 Perbandingan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 19

2.4 Analisa Kinerja Pelayanan Satpol PP 19

2.5 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP 20

2.6 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 30

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 30

2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Daerah..... 32

3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 38

BAB VIII PENUTUP..... 58

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATARBELAKANG

Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Sumedang sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Berdasarkan diktum kedua instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancangan lainnya, maka sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai koordinator tim penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025, melakukan pembahasan yang mencakup :

- A. Penentuan kegiatan prioritas yang disesuaikan dari Rencana Strategis 2024 – 2026;

- B. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025;
- C. Rumusan-rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025;
- D. Dokumen kebutuhan perencanaan lainnya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan penjabaran program / kegiatan / sub kegiatan dari perkembangan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi perangkat daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumedang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024, berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentan pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rpjmn Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam mengoperasionalkan RPD Kabupaten

Sumedang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

2. Merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sesuai Renstra perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif...

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah Menegakkan Peraturan Daerah dan Meneyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka diperlukannya rencana kerja yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran yang telah disusun didalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam merancang program dan kegiatan pada Rencana Kerja ini, kinerja Rencana Kerja tahun 2025 wajib dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas capaian kinerja Rencana Kerja 2025.

2.1.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar oleh Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. **21.048.964.836** yang terdiri dari anggaran :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. **6.980.871.780** Dan terealisasi sebesar Rp. **6.964.853.700** Atau **99,77 %**

- b. Urusan Pemerintah Bagian Sekretariat Rp. **14.068.093.056** dengan realisasi sebesar Rp. **13.850.722.533** Atau **98,45 %** dengan hasil capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	Satuan Polisi Pamong Praja							
1.05.0.00.00.00.5.	Belanja Daerah			21.048.964.836		20.815.576.233	98,89	
1.05.1.05.0.001.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sakip PD	A	14.068.093.056	A	13.850.722.533	98,45	
1.05.1.05.0.001.2.01.1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	120.591.860	12 Laporan	118371810	98,16	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	42.157.500	2 Dok	42.157.500	100	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	18.689.500	1 Dok	18.669.500	99,89	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	11.129.860	1 Dok	11.129.860	100	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	48.615.000	8 Laporan	46.414.850	95,47	
1.05.1.05.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	8.709.186.056	12 Laporan	8.534.226.138	97,99	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Org / Bulan	8.677.486.056	69 Org / Bulan	8.502.526.138	97,98	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.1.05.001.2.02.07.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	12 Laporan	31.700.000	12 Laporan	31.700.000	100	
1.05.1.05.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	85.200.310	12 Laporan	85.076.010	99,85	
1.05.1.05.001.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	62.680.000	1 Paket	62.556.000	99,80	
1.05.1.05.001.2.05.03.	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	22.520.310	5 Dokumen	22.520.010	100	
1.05.1.05.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	685.677.470	12 Laporan	685.547.514	99,98	
1.05.1.05.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.139.200	1 Paket	9.139.200	100	
1.05.1.05.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.173.420	4 Paket	100.126.920	99,95	
1.05.1.05.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	2 Paket	302.800.000	2 Paket	302.765.000	99,99	
1.05.1.05.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.602.850	2 Paket	23.602.730	100	
1.05.1.05.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	34.900.000	12 Dokumen	34.900.000	100	
1.05.1.05.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	215.162.000	18 Laporan	215.113.664	99,98	
1.05.1.05.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	1.850.000.000	2 Unit	1.828.000.000	98,81	
1.05.1.05.001.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	1.850.000.000	2 Unit	1.828.000.000	98,81	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lapangan	Lapangan yang Disediakan						
1.05.1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.980.663.960	12 Laporan	1.970.147.495	99,47	
1.05.1.05.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.695.960	12 Laporan	65.557.719	92,73	
1.05.1.05.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.909.968.000	12 Laporan	1.904.589.776	99,72	
1.05.1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	636.773.400	12 Laporan	629.353.566	98,83	
1.05.1.05.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	636.773.400	28 Unit	629.353.566	98,83	
Jumlah				14.068.093.056		13.850.722.533	98,45	
1.05.1.05.002.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	100 Persen	3.302.898.780	100 Persen	3.296.571.980	99,81	
1.05.1.05.002.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan ketertiban dan ketentraman)	100 Persen	2.952.898.780	100 Persen	2.946.606.620	99,79	
1.05.1.05.002.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	17 Kasus	350.000.000	17 Kasus	350.000.000	100	
1.05.1.05.002.2.01.02.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Kasus	450.000.000	17 Kasus	446.370.000	99,19	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan						
1.05.1.05.002.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.320.000	99,32	
1.05.1.05.002.2.01.06.	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	2.052.898.780	1 Dokumen	2.046.606.620	99,69	
1.05.1.05.002.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	75 Pelanggaran	350.000.000	75 Pelanggaran	349.965.360	99,99	
1.05.1.05.002.2.02.03.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	75 Laporan	350.000.000	75 Laporan	349.965.360	99,99	
1.05.1.05.004.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	90 Persen	3.677.973.000	90 Persen	3.672.591.720	99.85	
1.05.1.05.004.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap Response Timerate Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90 Persen	3.677.973.000	90 Persen	3.672.591.720	99.85	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.1.05.004.2.01.02.	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	12 Laporan	2.457.102.000	12 Laporan	2.457.000.620	99,99	
1.05.1.05.004.2.01.06.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 Unit	1.220.871.000	8 Unit	1.215.591.100	99,57	
	Jumlah			6.980.871.780		6.964.853.700	99,77	
	Jumlah Belanja			21.046.964.836		20.815.576.233	98,89	

2.1.2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang telah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar Rp. **19.514.385.420** yang terdiri dari anggaran :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. **6.555.312.100** Dan terealisasi sampai dengan Semester I sebesar Rp. **3.291.798.200** Atau **50,22 %**
- b. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Rp. **12.959.073.320** dengan realisasi sampai dengan Semester I sebesar Rp. **6.532.855.296** Atau **50,41 %** dengan hasil capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	Satuan Polisi Pamong Praja							
1.05.0.00.00.00.5.	Belanja Daerah			19.514.385.420		20.815.576.233	98,89	
1.05.1.05.0.0 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Sakip PD	A	12.959.073.320	A	13.850.722.533	98,45	
1.05.1.05.0.0 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	120.507.900	6 Laporan	68.783.900	57,08	
1.05.1.05.0.0 01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	43.696.900	2 Dok	43.621.900	99.83	
1.05.1.05.0.0 01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9.452.300	0 Dok	0,00	0,00	
1.05.1.05.0.0 01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8.985.000	1 Dok	1.500.000	16,69	
1.05.1.05.0.0 01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.682.500	0 Dok	0,00	0,00	
1.05.1.05.0.0 01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubhan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	6.269.500	0 Dok	0,00	0,00	
1.05.1.05.0.0 01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	8 Laporan	44.422.000	4 Laporan	23.662.000	53,27	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
1.05.1.05.0.0 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	9.534.982.720	6 Laporan	4.630.755.400	48.57	
1.05.1.05.0.0 01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Org / Bulan	9.509.112.720	69 Org / Bulan	4.618.230.400	48,57	
1.05.1.05.0.0 01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	25.870.000	6 Laporan	12.525.000	48.42	
1.05.1.05.0.0 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	18.000.000	2 Laporan	10.534.000	58.52	
1.05.1.05.0.0 01.2.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	10.534.000	58.52	
1.05.1.05.0.0 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	576.176.300	6 Laporan	388.512.229	67.43	
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.919.400	1 Paket	4.377.000	55.27	
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	87.755.100	4 Paket	68.371.800	77.91	
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.172.500	1 Paket	5.075.400	49.89	
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	225.780.000	2 Paket	153.160.000	67.84	
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak	2 Paket	23.637.300	2 Paket	11.817.100	49.99	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan						
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	38.562.000	6 Dokumen	19.281.000	50.00	
1.05.1.05.0.0 01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	182.350.000	9 Laporan	126.429.929	69.33	
1.05.1.05.0.0 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	82.041.400	1 Unit	44.095.476	53.75	
1.05.1.05.0.0 01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	2 Unit	82.041.400	1 Unit	44.095.476	53.75	
1.05.1.05.0.0 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.039.486.000	6 Laporan	1.009.220.519	49,48	
1.05.1.05.0.0 01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.474.000	6 Laporan	34.521.071	47.63	
1.05.1.05.0.0 01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.967.012.000	6 Laporan	974.699.448	49.55	
1.05.1.05.0.0 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	587.879.000	6 Laporan	274.316.500	46.66	
1.05.1.05.0.0 01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	491.500.000	28 Unit	274.316.500	55.81	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Operasional Atau Lapangan							
1.05.1.05.0.0 01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	1 Unit	96.379.000	0 Unit	0,00	0,00	
1.05.1.05.0.0 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	100 Persen	3.506.403.500	100 Persen	1.667.051.400	47.54	
1.05.1.05.0.0 02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Laporan / Temuan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang ditangani	100 Persen	3.306.403.500	50 Persen	1.522.392.000	46.04	
1.05.1.05.0.0 02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	86.168.000	47.45	
1.05.1.05.0.0 02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	192.458.900	99,73	
1.05.1.05.0.0 02.2.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1.806.403.500	1 Dokumen	605.283.100	33,51	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.1.05.0.0 02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Doku men	628.358.300	1 Doku men	327.355.300	52.10	
1.05.1.05.0.0 02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Doku men	521.641.700	1 Doku men	304.126.800	58.30	
1.05.1.05.0.0 02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	100 Persen	200.000.000	62 Persen	144.659.4000	72,33	
1.05.1.05.0.0 02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	75 Lapo ran	150.000.000	25 Lapo ran	106.783.000	71.19	
1.05.1.05.0.0 02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Wilayah Kegiatan Pengawasan	26 Keca matan	50.000.000	8 Kecamat an	37.876.400	75.75	
1.05.1.05.0.0 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95 Per sen	3.048.908.600	47 Persen	1.503.262.600	49.30	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.1.05.0.0 04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap Response Timerate Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	95 Per sen	2.955.708.700	47.33 Persen	1.503.262.600	50.86	
1.05.1.05.0.0 04.2.01.0002	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	150 Lapo ran	2.474.064.000	71 Laporan	1.275.532.600	51.56	
1.05.1.05.0.0 04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	12 Lapo ran	46.575.000	6 Laporan	22.900.000	49.17	
1.05.1.05.0.0 04.2.01.0006	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	435.069.700	3 Unit	204.830.000	47.08	
1.05.1.05.0.0 04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	260 Orang	93.199.900	0,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.0.0 04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yang di bentuk	260 Orang	93.199.900	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja			19.514.385.420		9.596.532.024	49.18	

2.1.2. Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.2
Target dan Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja

No	IKU	Satuan	Target Dan Capaian IKU				TINGKAT CAPAIAN
			2022		2023		
			Target RPJMD	Capaian	Target RPJMD	Capaian	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	Persen	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	90	97,78	95	89.83	94,56
Tingkat Capaian Kinerja							97,28

Formulasi Perhitungan :

- 1. Pelanggaran K-3 yang terselesaikan / Jumlah Pelanggaran K-3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %
- 2. Jumlah Penanganan Kebakaran / Jumlah Kejadian Kebakaran x 100%

Capaian Kinerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2023 berdasarkan target tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja 97,28%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATPOL PP

Penetapan Indikator Kinerja Pertama yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban) yang dapat diselesaikan yang tertuang didalam dokumen RENJA PD untuk tahun 2023 Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100,00 % telah terealisasi sebesar 100,00% dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100% yang dapat disimpulkan bahwa makin menurunnya persentase daerah rawan gangguan trantibum di beberapa wilayah yang berdampak kepada meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumedang. Hal ini dicapai dengan meningkatkan intensitas Patroli Wilayah serta Monitoring setiap hari pada Pagi, Siang dan Malam hari pada daerah - daerah yang teridentifikasi rawan gangguan ketentraman

dan ketertiban umum.

Perlu kami sampaikan ada beberapa Kecamatan yang kami anggap sangat diperlukannya bukan hanya Patroli oleh SATPOL PP secara intensif tetapi juga peran serta aktif masyarakat yang berada di wilayah tersebut guna pencegahan gangguan trantibum sedini mungkin, di seluruh wilayah Kecamatan.

Untuk Indikator Kinerja Kedua yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yang tertuang didalam dokumen RENJA PD untuk tahun 2023 telah ditetapkan Target Kinerja sebesar 95% telah terealisasi sebesar 89,83 % dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 94,56% telah mencapai keberhasilan dalam pencapaian target kinerjanya yang secara tidak langsung berdampak terhadap kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 5 menyatakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mempunyai Fungsi antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah,

sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Pasal. 13 huruf (c), dan Pasal 148 serta 149, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya.

Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan nyaman.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hambatan dan Permasalahan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kurang Maksimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengadministrasian urusan Ketata usahaaan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil - hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal.
3. Kurangnya data informasi Satuan Polisi Pamong Praja yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak sehingga kegiatan dilapangan kadang mengalami hambatan contoh sarana transportasi yang belum mencukupi untuk patroli.
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Penindakan (Yustisi) terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

5. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Kurangnya pengawasan Objek Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
7. Kurangnya Anggaran dalam Penanganan dan Pelaksanaan Penindakan / yustisi terhadap Pelanggar Peraturan Daerah.
8. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
9. Kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak dalam melaksanakan kegiatan dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
10. Kurangnya koordinasi antara Instansi Terkait serta Instansi Penegak Hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan Keamanan, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
11. Kurangnya mutu dan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Pengetahuan petunjuk teknis dan pemahaman dalam pelaksanaan penegakan kewanibawaan, ketertiban dan penegakan perda melalui tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
13. Berdasarkan Permendagri no 17 tahun 2019 pasal 16. Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan peralatan yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas penegakan perda dan perkara. Salah satunya adalah pengamanan pileg dan pilkada yang dimana peralatan Satpol PP Kabupaten Sumedang perlu peremajaan agar bisa menjalankan kinerja dengan baik.
14. Berdasarkan Permendagri no 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja pasal 11, Standar jumlah pegawai Satpol PP di Kabupaten Sumedang berjumlah 350 Anggota, sedangkan saat ini anggota satpol

pp hanya memiliki 120. Dengan demikian Satpol PP Kabupaten Sumedang belum dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal terutama dalam pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan kepala daerah.

Setelah mengetahui permasalahan utama dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang telah diuraikan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menetapkan 7 (Tujuh) Kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan sosialisasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya.
2. Meningkatkan kegiatan operasional dan pelaksanaan yustisi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan terkendali.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan K3 (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum) untuk mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Bersih.
4. Meningkatkan koordinasi kepada beberapa pihak dalam Penengakan Perda serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Memperbanyak kegiatan Trantibum serta Pencegahan Tindak Kejahatan serta pemberdayaan masyarakat.
6. Melakukan validasi data/informasi yang diperoleh dari masyarakat, kecamatan dan kelurahan.
7. Mengusulkan tambahan Pagu Anggaran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
8. Mengusulkan fasilitas dan peremajaan peralatan yang digunakan sebagai penunjang pengamanan pemilihan

legislative dan pemilihan kepala daerah.

- 9. Mengusulkan penambahan SDM Satuan Polisi Pamonh Praja Kabupaten Sumedang.
- 10. Membentuk Mitra Tibumtranmas di Desa Se-Kabupaten Sumedang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada beberapa catatan penting yang kami sampaikan dalam meriview RKPD Tahun 2023 dengan jumlah 3 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dimana catatan penting tersebut erat kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah kami targetkan dan yang akan kami capai di dalam pelaksanaannya, antara lain :

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	Satuan Polisi Pamong Praja							
1.05.0.00.00.00.5.	Belanja Daerah			21.048.964.836		20.815.576.233	98,89	
1.05.1.05.0.001.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sakip PD	A	14.068.093.056	A	13.850.722.533	98,45	
1.05.1.05.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	120.591.860	12 Laporan	118371810	98,16	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	42.157.500	2 Dok	42.157.500	100	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	18.689.500	1 Dok	18.669.500	99,89	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	11.129.860	1 Dok	11.129.860	100	
1.05.1.05.	Koordinasi Dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	8	48.615.000	8	46.414.850	95,47	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.001.2.01.06.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan			
1.05.1.05.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	8.709.186.056	12 Laporan	8.534.226.138	97,99	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Org / Bulan	8.677.486.056	69 Org / Bulan	8.502.526.138	97,98	
1.05.1.05.0.001.2.02.07.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	31.700.000	12 Laporan	31.700.000	100	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	85.200.310	12 Laporan	85.076.010	99,85	
1.05.1.05.0.001.2.02.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	62.680.000	1 Paket	62.556.000	99,80	
1.05.1.05.0.001.2.02.03.	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	22.520.310	5 Dokumen	22.520.010	100	
1.05.1.05.0.001.2.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	685.677.470	12 Laporan	685.547.514	99,98	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.139.200	1 Paket	9.139.200	100	
1.05.1.05.0.001.2.02.02.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.173.420	4 Paket	100.126.920	99,95	
1.05.1.05.0.001.2.02.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang	2 Paket	302.800.000	2 Paket	302.765.000	99,99	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Disediakan						
1.05.1.05.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.602.850	2 Paket	23.602.730	100	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	34.800.000	12 Dokumen	34.800.000	100	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	215.162.000	18 Laporan	215.113.664	99,98	
1.05.1.05.0.001.2.07.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	1.850.000.000	2 Unit	1.828.000.000	98,81	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.850.000.000	2 Unit	1.828.000.000	98,81	
1.05.1.05.0.001.2.08.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.980.663.960	12 Laporan	1.970.147.495	99,47	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.695.960	12 Laporan	65.557.719	92,73	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.909.968.000	12 Laporan	1.904.589.776	99,72	
1.05.1.05.0.001.2.09.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	636.773.400	12 Laporan	629.353.566	98,83	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	636.773.400	28 Unit	629.353.566	98,83	
		Jumlah		14.068.093.056		13.850.722.533	98,45	
1.05.1.05.0.002.	Program Peningkatan	Persentase Pelanggaran Perda	100 Per	3.302.898.780	100 Persen	3.296.571.980	99,81	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	dan Perbup yang ditangani	sen					
1.05.1.05.0.002.2.01.1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan ketertiban dan ketentraman)	100 Per sen	2.952.898.780	100 Persen	2.946.606.620	99,79	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	17 Kasus	350.000.000	17 Kasus	350.000.000	100	
1.05.1.05.0.002.2.01.02.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	17 Kasus	450.000.000	17 Kasus	446.370.000	99,19	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.320.000	99,32	
1.05.1.05.0.002.2.01.06.	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	2.052.898.780	1 Dokumen	2.046.606.620	99,69	
1.05.1.05.0.002.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	75 Pelanggaran	350.000.000	75 Pelanggaran	349.965.360	99,99	
1.05.1.05.0.002.2.02	Penanganan Atas Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan	75 Lapo	350.000.000	75 Lapo	349.965.360	99,99	

Kode Rekening	Uraian Urusan / Bidang/ Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosen tase	PD
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.03.	Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	ran					
1.05.1.05.0.004.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	90 Per sen	3.677.973.000	90 Persen	3.672.591.720	99.85	
1.05.1.05.0.004.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap Response Timerate Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90 Per sen	3.677.973.000	90 Persen	3.672.591.720	99.85	
1.05.1.05.0.004.2.01.02.	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	12 Laporan	2.457.102.000	12 Laporan	2.457.000.620	99,99	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 Unit	1.220.871.000	8 Unit	1.215.591.100	99,57	
Jumlah Belanja				21.048.964.836		20.815.576.233	98,89	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimana hal tersebut tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabilitas, Transparan dan Partisipatif. Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi aparatur pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil sebagai pedoman pemerintah daerah dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman suasana batin dan ketertiban lingkungan di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum dan tertib sosial serta partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana / pemadaman kebakaran yang mandiri lingkungan di wilayahnya masing-masing;
2. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara;
4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya, maupun dengan Satuan

Polisi Pamong Praja perbatasan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dibutuhkannya strategi – strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut diatas. Strategi Nasional yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana untuk satuan keamanan mengikuti gerak perkembangan / pemekaran wilayah.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan.
4. Penambahan sarana komunikasi dan transportasi untuk mendukung tugas-tugas dilapangan.
5. Peningkatan pengamanan bangunan vital milik Pemda dan rumah dinas Pimpinan Daerah.
6. Menegakkan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Pengembangan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda.
8. Meningkatkan pengamanan pimpinan daerah, nasional, pejabat pusat dan tamu negara.
9. Peningkatan sosialisasi Perda dan Peraturan pelaksanaannya, serta implementasinya di lapangan.
10. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum.

- 11. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
- 12. Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum.
- 13. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Dalam dokumen perencanaan RENJA PD Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang melekatkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah apa yang akan dicapai dan dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan RENJA ialah Suatu kondisi yang ideal yang ingin dicapai/dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) Tahun, Tujuan Satpol PP adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat	Indek Kerukunan Umat Beragama
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dan proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif, sehingga dapat

diukur secara nyata dalam waktu tertentu atau tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada
2	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Tujuan dan Sasaran serta Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Didalam usulan Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mengusulkan Program yang kami kategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Program Wajib dan Program Penunjang yaitu :

3.3.1. Program Urusan Wajib merupakan program yang hasil capaiannya menuju kepada Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang didalam Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah, antara lain :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1.1. Kegiatan

- 1.1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- 1.1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1.2. Sub Kegiatan

- 1.2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentra-man dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 1.2.2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.2.3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 1.2.4. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.2.5. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 1.2.6. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 1.2.7. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1.2.8. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.2.9. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

1.2.10. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.1. Kegiatan

2.1.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

2.1.2. Investigasi Kejadian Kebakaran

2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

2.2. Sub Kegiatan

1.2.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

1.2.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.2.3. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

1.2.4. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

1.2.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

1.2.6. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

1.2.7. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

3.3.2. Program Penunjang merupakan program yang hasil capaiannya merupakan pendukung dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di bidang Sekretariat, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan

- 1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2. Sub Kegiatan

- 1.2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2.7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 1.2.8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.2.9. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.2.10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.2.11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.2.12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.2.13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.2.14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.2.15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.2.16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.2.17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.2.18. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.2.19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.2.20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.2.21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.2.22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.2.23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana SATPOL PP Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

Dokumen RENJA Perangkat Daerah tersebut berisikan usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2025.

Usulan Program dan Kegiatan SATPOL PP sebagai berikut :

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SUMEDANG
TAHUN 2025

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.869.633.326,00							27.899.602.200,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASTARIKAT						21.869.633.326,00							27.899.602.200,00		
1.05.01		PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.253.033.326,00							17.384.000.000,00		
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	132.000.000,00					Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m enyajikan keperluan masyarakat yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-	164.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Uluwu, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				47.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, dan berdampak			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, dan berdampak			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, dan berdampak			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1 Dokumen				10.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																
	1.05.01.2.01.0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan				50.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.544.083.720,00							9.760.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orangbulan	9.509.083.720,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			9.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
	1.05.01.2.02.007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah						380.000.000,00				Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			425.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	350.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Pengukuran digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brotkrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawalan															
			Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepengawalan				5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Pengukuran digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brotkrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	957.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Pengukuran digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brotkrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		1.205.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINSTR OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemadangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi dan inovasi pemerintah lokal untuk m evoluasi dan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	250.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi dan inovasi pemerintah lokal untuk m evoluasi dan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi dan inovasi pemerintah lokal untuk m evoluasi dan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	350.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi pemerintahan untuk mewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			370.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			26.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	42.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			45.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANS OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	250.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.150.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-	-	2.750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		2.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya														

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5 Unit	150.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah		-			-	2.268.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		2.279.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan				78.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		79.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							12 Laporan	2.190.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pendataan Daerah, Penguatan digitalisasi lata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		2.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				861.950.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pendataan Daerah, Penguatan digitalisasi lata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		1.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya					28 Unit	551.950.200,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pendataan Daerah, Penguatan digitalisasi lata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	5	6	7	1 Unit	300.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12	13	14	15	16	17
																750.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	2.650.000.000.00							-	5.388.075.810,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	1.850.000.000.00							100 Persen	4.188.075.810.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	200.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-					350.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembelajaran Perindungan Masyarakat dalam rangka Keterlindungan dan Kelerlindungan Umum				1 Dokumen	200.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Desa Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			250.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Kapasitasnya				120 Orang	350.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Desa Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			300.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Kelentiran dan Keleritan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kepahitan				1 Dokumen	0.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DBH-UKAI HASIL TEMBANGAU (CHT)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Desa Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			1.438.075.610.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Keleritan Umum dan Keleritaman Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKTIK KAPAIAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan Daerah, Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan bekerja yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum Melalui Dialeksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum yang Dialeksi Melalui Dialeksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	600.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan Daerah, Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan bekerja yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Alas Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan Daerah, Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan bekerja yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			850.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENGENDAIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.02.2.02		Penggiatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	100 Persen			-	650.000.000.00				Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Penilaian Daerah, Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-	100%Persen	1.050.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	0.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				150.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				75 Laporan	500.000.000.00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				750.000.000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan yang Didukung Terhadap Kepatuhan Terhadap Pemeriksaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan brokrasi yang efisien, efektif dan berdampak	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	23 Orang			-	150.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan brokrasi yang efisien, efektif dan berdampak	-	23 Orang	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Keter PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPNS Peringkat Pertama				23 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evujudkan brokrasi yang efisien, efektif dan berdampak	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.85.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	2.336.000.000,00						-	4.337.526.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGENDAIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penganganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	120 Kejadian	-	-	-	2.956.000.000,00	-	-	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Pelayanan Daerah, Pengaturan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m evoluasi brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak	-	120 Kejadian	3.778.206.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KSPM Pencegahan/Peninggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen				0,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan Pengkax Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan				2.310.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.918.206.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standansi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Peninggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Peninggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), SdH, dan Legal				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Pengujian digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, berdampak			60.000.000,00		
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Peninggulangan Kebakaran				104 Orang	0,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Pengujian digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, berdampak			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Peninggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Peninggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang SdH dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	576.000.000,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Pengujian digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, berdampak			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSI OPD	REALISASI CAPAIAN REHJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKAPAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	1207 Kejadian			-	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak		1207 Kejadian	165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.03.0001		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Didukung Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	0,00	Kab. Sumedang, Sumedang Uluara, Situ	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	750 Orang			-	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penilaian Daerah, Penggunaan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak		250 Orang	394.319.990,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembinaan Rukun Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REHSTA OPD	REALISASI CAPAIAN REHJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REHJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terbina Relevan Pemadatan Kedataran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kedataran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				91 Desa/Kelu rahan	0,00	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Pelayanan Daerah, Pengaturan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak			394.319.990,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			JUMLAH					21.889.833.926,00								27.899.802.200,00	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, ***Community Base Development (CBD)*** dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku - pelaku (***stakeholders***) dalam menciptakan ***Good Gavernance*** sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (***trickle down effect***) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar - benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Tahunan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

RENJA PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur SATPOL PP, dan juga berfungsi pula sebagai bahan dalam melakukan Penilaian atau Pengukuran Kinerja SATPOL PP.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Perangkat Daerah SATPOL PP Kabupaten Sumedang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Sumedang, Juli 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

SYARIF EFFENDI BADAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710307 199101 1 004